KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA: KEBIJAKAN BERBASIS RISET

Dr. Sar Joni Herri, M.Pd
UMN Alwasliyah - Medan
joni.herri@gmail.com

ABSTRACT

Technological achievements of the 21st century has affected all aspects of social, political, cultural, Educational, and religious. In the field of education, education reform must be done in order to remain relevant to contemporary circumstances. Therefore, vigorous research activities carried out by the government, namely the Ministry of Education and Culture, education practitioners, students and professors of the universities, and teachers at the school. But unfortunately, most of the results of these studies are still struggling in the micro range. Within the framework of basic education in the Graduate School of Education University of Indonesia. Since 2006 until 2013, virtually no research has "dared" the theme in the context of the macro, such as education policy, problems of primary education access and mother tongue. Tens and even hundreds thesis carefully made by students just become dusty piles of paper in the library. Process research and policy education is still being on their own. The involvement of each party that conducts research and policy makers have not resulted in a synergy that can contribute to the quality of national education. In the era of education based on science, research results can be used as an important basis in education policy.

Keyword: *policy, education, research, government, university*

ABSTRAK

Pencapaian teknologi dari abad ke-21 telah mempengaruhi semua aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, dan agama. Di bidang pendidikan, reformasi pendidikan harus dilakukan agar tetap relevan dengan situasi kontemporer. Oleh karena itu, kegiatan penelitian yang kuat dilakukan oleh pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, praktisi pendidikan, mahasiswa dan dosen dari universitas, dan guru di sekolah. Namun sayangnya, sebagian besar hasil penelitian tersebut masih berjuang di kisaran mikro. Dalam kerangka pendidikan dasar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Sejak tahun 2006 hingga 2013, hampir tidak ada penelitian telah "berani" tema dalam konteks makro, seperti kebijakan pendidikan, masalah akses pendidikan dasar dan bahasa ibu. Puluhan bahkan ratusan tesis hati-hati dibuat oleh siswa hanya menjadi tumpukan berdebu kertas di perpustakaan. Proses penelitian dan pendidikan kebijakan masih berada di mereka sendiri. Keterlibatan masing-masing pihak yang melakukan penelitian dan pembuat kebijakan belum menghasilkan sinergi yang dapat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan nasional. Dalam era pendidikan berbasis pada ilmu pengetahuan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penting dalam kebijakan pendidikan.

Kata kunci : kebijakan, pendidikan, penelitian, pemerintah, universitas

PENDAHULUAN

Capaian teknologi di abad 21 telah menyentuh seluruh lini kehidupan, baik

sosial, politik, budaya, pendidikan, maupun agama, tidak ada yang luput dari sentuhan tangan dingin teknologi. Diciptakannya Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (E-KTP), hitung cepat pemilu secara *real time* via jaringan televisi dan internet, belajar jarak jauh via aplikasi Skype dan atau Youtube, kitab-kitab kuning dan al-Qur'an digital, adalah sebagian produk-produk yang lahir dari rahim teknologi di abad ini.

Pendidikan sebagai garda terdepan dan sekaligus pilar utama kemajuan peradaban suatu bangsa, dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disebutkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk melahirkan generasi yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, namun juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dewasa ini, tatanan sosial masyarakat telah berubah sedemikian pesat. Cara-cara tradisional untuk mengerjakan tugas-tugas kehidupan telah mulai ditinggalkan, dan beralih kepada cara-cara modern yang lebih praktis. Merakit kendaraan, mengemas makanan, menenun kain, dan membersihkan pakaian dapat dilakukan oleh mesin/robot; melukis, membuat desain suatu produk, membuat aplikasi, dan mengedit video dapat dilakukan dengan aplikasi Photoshop, Corel Draw, dan atau Corel Video Studio; melakukan konferensi pers, mengirim pesan, dan panggilan video dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Skype, Youtube, Line, WhatsApp, We Chat, dan atau Kakao Talk; pun dalam praktek pendidikan dasar, penggunaan komputer, proyektor, buku-buku elektronik, dan media-media pembelajaran berbasis aplikasi multimedia interaktif telah banyak digunakan oleh sebagian sekolah dengan fasilitas TIK yang memadai.

Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin meluas, perubahan demi perubahan pun terjadi. Inovasi-inovasi baru ditemukan, penemuan-penemuan terdahulu mulai ditinggalkan dan digantikan dengan penemuan-penemuan baru yang lebih canggih. Konsekuensinya, manusia sebagai

konsumen utama teknologi, harus berupaya menyetarakan (*up to date*) dirinya dengan kemajuan zaman.

Dalam ranah pendidikan, pembaharuan-pembaharuan pun perlu dilakukan agar pendidikan senantiasa relevan dengan keadaan zaman. Maka dari itu, penelitian dan pengembangan giat dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), para praktisi pendidikan, baik mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi, maupun guru di sekolah.

Namun sayangnya, sebagian besar dari hasil-hasil penelitian tersebut masih berkutat di lingkup mikro, yaitu mengenai penerapan dan atau pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SD atau PAUD. Itulah yang terjadi di program studi Pendidikan Dasar (Pendas) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (SPs UPI). Sejak berdiri pada tahun akademik 2006/2007 sampai tahun 2013, hampir tidak ada penelitian yang 'berani' mengambil tema di lingkup makro, seperti kebijakan-kebijakan pendidikan, problema akses pendas, dan *mother tongue*. Hasil-hasil penelitian yang ada pun diperparah dengan tidak adanya *follow up* lebih lanjut dari pihak yang berwenang (baca: UPI) untuk mengetahui implementasi dari penelitian-penelitian tersebut. Akibatnya, puluhan dan bahkan ratusan tesis yang dibuat dengan susah payah oleh mahasiswa hanya menjadi onggokan kertas berdebu di perpustakaan.

Permasalahan tersebut tentunya tidak timbul tanpa sebab, melainkan terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicunya, salah satunya adalah tidak adanya jalinan kerja sama yang baik antara Kemendikbud dengan SPs UPI. Karena tidak adanya kerja sama yang baik di antara keduanya, kebijakan Kemendikbud dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pendas SPs UPI cenderung berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergitas.

Sebagaimana diketahui, sebagian dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang selama ini diputuskan oleh Kemendikbud, seperti pembiayaan pendidikan, pergantian kurikulum, dan sertifikasi guru, tidak didasarkan pada penelitian ilmiah yang melibatkan mahasiswa.

LANDASAN TEORI

Kebijakan

Dari segi bahasa, kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*) berasal dari kata dasar yang sama, yaitu bijak. Namun, secara maknawi, kebijakan dan kata bijak atau kebijaksanaan itu sendiri memiliki pengertian yang berbeda. Alasannya adalah bahwa yang menjadi landasan utama suatu kebijakan adalah akal, sedangkan kebijaksanaan lebih didasarkan kepada budi manusia (Tilaar dan Nugroho, 2009). Jadi, sebuah kebijakan belum tentu bijak dan kebijaksanaan belum tentu sebuah kebijakan.

Dalam kamus Oxford, kebijakan diartikan sebagai rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Namun dalam prakteknya, kebijakan merupakan janji yang dibuat untuk kita sendiri (Fattah, 2012), dalam konteks negara, kebijakan berarti janji yang dibuat oleh pemerintah untuk kemudian dipatuhinya. Janji tersebut merupakan rumusan strategi yang dibuat untuk menyikapi dinamika sosial, politik, agama, dan budaya.

Secara sederhana, kebijakan dapat diartikan sebagai “apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan,” (Dye dalam Fattah, 2012). Istilah kebijakan berupaya menjelaskan secara ringkas berbagai tindakan mulai dari mencermati isu atau masalah, merumuskan formulasi dan memutuskan, sampai pada implementasi, monitoring dan evaluasi (Bakry, 2010). Selanjutnya, kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah atau konflik dan diarahkan untuk

mencapai tujuan tertentu (Harman dalam Fattah, 2013).

Dari paparan tersebut, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rumusan strategi, konsep, dan model yang dibangun melalui proses analisis komprehensif guna menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik tertentu sehingga pembuat kebijakan (pemerintah) dapat menentukan pilihan untuk bertindak atau diam. Selanjutnya, sebagai konsekuensi pilihan tersebut, akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Fungsi Kebijakan

Kebijakan pendidikan dalam prakteknya memiliki dua fungsi, yaitu untuk menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan, dan melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru (Wahyudin, 2009).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BKP, dalam Fattah, 2012). Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang, baik internal maupun eksternal (Fattah, 2012).

Dalam prakteknya, kedua fungsi tersebut dapat berbentuk peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan tata kelola pendidikan (*Education Governance*) yang dijabarkan secara jelas dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Dengan demikian, akuntabilitas norma dan budaya serta pengukuran kinerja siswa dan guru dapat dilakukan. Pada akhirnya, seluruh kebijakan-kebijakan tersebut bermuara kepada satu tujuan, yaitu perwujudan visi dan misi

pendidikan nasional (Tilaar & Nugroho, 2009).

Berbicara mengenai kebijakan pendidikan, tentu tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai kebijakan publik, karena keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang saling melekat. Sebelum membahas kebijakan pendidikan, terlebih dahulu kita kaji mengenai kebijakan publik.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu, analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis dan dapat dirunut sejak adanya peradaban umat manusia. Sejak itu, kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2008).

Kebijakan publik menurut Aminuddin Bakry (2010), merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya. Pengertian lainnya, kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan, dan peraturan-peraturan pemerintah. Namun sebagian

lagi mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman acuan, strategi dan kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan.

Disadari variasi pengertian kebijakan publik begitu luas dan tidak dapat dihindari, karena istilah kebijakan berupaya menjelaskan secara ringkas berbagai tindakan mulai dari mencermati isu atau masalah, merumuskan formulasi dan memutuskan, sampai pada implementasi, monitoring dan evaluasi. Tulisan ini mengacu pada pengertian bahwa setiap perundang-undangan dan peraturan adalah kebijakan, akan tetapi tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan. Dalam konteks pengertian kebijakan publik seperti tersebut, teridentifikasi dimensi-dimensi yang saling bertautan antara kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal secara hukum, kebijakan publik sebagai hipotesis dan kebijakan publik sebagai tujuan (Bridgeman dan Davis dalam Bakry, 2010).

Berkenaan dengan definisi kebijakan ini, Budi Winarno (2005) mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

Berdasarkan pembahasan di atas, kebijakan publik dapat dipersepsikan sebagai respons suatu sistem politik—melalui kekuasaan pemerintah—terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan *pemerintah* guna memecahkan masalah *publik*. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan - tindakan. Kata 'publik' dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti *negara*—sistem politik serta

administrasi. Sementara 'pemerintah' adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh seluruh anggota suatu

Kebijakan Pendidikan

Definisi kebijakan publik telah dikemukakan pada bagian terdahulu, sementara pengertian kebijakan pendidikan berangkat dari pemikiran Tilaar dan Nugroho yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam habitusnya yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksi budayanya itu sendiri (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Konstruksi pemikiran di atas bermakna bahwa pendidikan adalah proses pemberdayaan sehingga peserta didik menjadi mandiri, kreatif dan bertanggung jawab atas eksistensinya. Tilaar dan Nugroho mengelaborasi pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, Romo Mangun, dan Paulo Freire. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai suatu proses pemberdayaan untuk menumbuhkembangkan kemandirian manusia karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas eksistensi dirinya, tidak seorang pun berhak merampas kemandirian orang lain, dan hak menjadi diri sendiri menunjukkan identitas seseorang yang diwujudkan melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini juga senada dengan pandangan Romo Mangun yang memandang manusia sebagai makhluk kreatif yang dianugerahi kebebasan berpikir agar dapat menentukan dirinya sendiri. Untuk mengeksplorasi kemampuan yang diberikan sang pencipta tersebut, sehingga membuahkan kreasi-kreasi baru, dibutuhkan suasana kebebasan yang dapat menjamin kemerdekaan berdialog dengan dirinya sendiri, sesama

peserta didik, dengan alam dan dengan pendidiknya. Romo Mangun tidak percaya bahwa proses pendidikan yang bersifat otoriter yang membatasi kebebasan peserta didik dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Ketidakpercayaan Romo Mangun tersebut, sejalan dengan Paulo Freire yang melihat proses memanusiakan manusia lewat dialog dan interaksi dengan sesama manusia dalam suasana kemerdekaan dan kebebasan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Istilah kemerdekaan dan kebebasan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konsep kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat lepas dari kekuasaan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeksplorasi potensi dasarnya dan berinteraksi sesama manusia sehingga jati dirinya sebagai manusia dewasa dan sempurna dapat terwujud. Apabila diinginkan suatu masyarakat demokrasi maka yang pertama-tama dilakukan adalah mendemokratisasikan pendidikan. Hal ini berarti pendidikan bukanlah suatu yang mencekoki peserta didik dengan ilmu pengetahuan tetapi ilmu pengetahuan itu dimiliki karena pengalaman peserta didik dalam suasana kebebasan dan kemerdekaan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Uraian di atas memperlihatkan keterkaitan yang erat antara pandangan tentang manusia dengan proses pendidikan. Proses memanusiakan untuk mewujudkan kemerdekaannya diperlukan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pribadi yang merdeka, sehingga proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktek pendidikan atau disebut praksis pendidikan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Artinya, visi dan misi pendidikan merupakan penjabaran dari pandangan tentang hakikat manusia atau filsafat manusia yang menganggap manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial sekaligus. Dengan demikian, perumusan visi dan misi pendidikan sangat

tergantung pada aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya di mana dia hidup. Oleh karena pendidikan merupakan suatu pengetahuan praksis maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan.

Dalam konteks inilah kebijakan pendidikan harus di pandang berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis di mana visi dan misi pendidikan mengakomodasi esensi filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.

Menurut Tilaar dan Nugroho (2009) bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan.

Dari skema pembuatan kebijakan pendidikan di Indonesia, kita mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah adalah bersumber kepada falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, dalam konteks inilah kebijakan pendidikan harus dipandang berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis di mana visi dan misi pendidikan mengakomodasi esensi filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi

manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya (Bakry, A, 2010).

Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik

Diperlukan adanya sinergitas, upaya yang serius, sistematis, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait yang meliputi keluarga, masyarakat, dan pemerintah guna menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang ada. Namun seluruh usaha perbaikan tersebut hanya dapat berlangsung dengan baik jika terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi pandangan hidup bersama (Bachtiar, 2013).

Kebijakan di sini berada dalam konteks yang lebih spesifik dan inhern antara kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, karena secara substantif, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan dan ranah publik yang selama ini ada cenderung berjalan masing-masing; tidak menyatu satu dengan lainnya. Contohnya riilnya adalah kebijakan pemerintah dalam mendirikan KPI dan lahirnya UU ITE. Meskipun keduanya bertujuan untuk mereduksi hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari tayangan-tayangan media massa dan internet, namun itu masih bersifat umum, belum menyentuh harapan pendidikan. Sinetron-sinetron yang menampilkan anak-anak usia SD dan menengah yang berpacaran, berpenampilan menor di sekolah, memakai barang-barang mewah, berbahasa tidak santun, melawan kepada orang tua dan guru, dan sosok guru yang tidak berwibawa adalah konten-konten yang seharusnya mendapat penekanan secara khusus dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Karena sejatinya hal-hal tersebut memiliki andil besar dalam merusak generasi muda Indonesia.

METODE

Masalah dalam kajian ini berkenaan dengan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik di Indonesia. Guna memperoleh gambaran yang relatif utuh

mengenai masalah dan solusi pemecahannya, kajian ini menggunakan metode studi literatur (kajian pustaka), yaitu kajian yang bertujuan untuk menyusun teori dasar penelitian. Materi-materi yang digunakan bersumber dari makalah, buku, surat kabar, majalah, maupun jurnal penelitian.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan proses pembuatan kebijakan pendidikan hingga saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Implikasinya, masing-masing pihak yang melakukan penelitian maupun pengambil kebijakan belum menghasilkan sebuah sinergi yang dapat mendorong tercapainya pendidikan nasional yang berkeadilan, produktif, dan berkualitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Di era pendidikan berbasis sains, hasil penelitian (riset) dapat dijadikan pondasi penting dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Hal ini dinilai urgen, karena kebijakan pendidikan yang berbasis riset akan mampu menjawab permasalahan pendidikan yang ada secara tepat guna dan efisien.

Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc., Direktur Industri, Iptek dan BUMN dari Bappenas, dalam seminar nasional bertajuk "Menghubungkan Penelitian dengan Kebijakan untuk Transformasi Sosial" yang diselenggarakan di Semarang pada Kamis (27/09/12), mengungkapkan bahwa "Tanpa pengetahuan atau riset, pembangunan hanya menghasilkan pepesan kosong." Lebih lanjut, Mesdin mengingatkan bahwa hasil riset sangat penting dalam pembuatan sebuah kebijakan. Dengan adanya hasil riset, peluang terjadinya transaksi politik dalam pembuatan suatu kebijakan dapat diminimalisir. "Saat ini, proses pembuatan kebijakan publik adalah hasil bargaining antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, hasil riset menjadi penting sebagai bahan pertimbangan agar proses bargaining tidak bernuansa transaksional politis," (*Institute for Research and*

Empowerment. Online, Jumat, 28 September 2012).

Tilaar (2009) menilai bahwa, infiltrasi paham neoliberalisme dalam ranah pendidikan telah mengakibatkan terjadinya benturan antara idealisme pendidikan dengan tuntutan-tuntutan pragmatis dari era globalisasi yang didominasi paradigma ekonomi. Sehingga kebijakan-kebijakan pendidikan yang lahir pun lebih bersifat materialistis; *Money oriented*.

Kebijakan pendidikan yang bersifat politis dan transaksional mengakibatkan kemandulan dalam proses implementasinya. Hal ini tentu sangat merugikan bagi semua pihak, terutama masyarakat umum yang menjadi pelaksana terdepan dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah.

Alternatif Solusi

Tidak adanya sinergi antara pemerintah dan LPTK dalam hal pembuatan kebijakan pendidikan, mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak dan juga masyarakat sebagai pelaksana utama dari kebijakan-kebijakan tersebut. Kerugian bagi pemerintah adalah tidak efektifnya kebijakan pendidikan yang dibuat dalam mengatasi permasalahan yang ada; bagi LPTK, tidak terpakainya hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa; dan bagi masyarakat, inefisiensi uang pajak yang mereka bayarkan karena digunakan untuk membuat kebijakan yang salah kaprah, terlebih masyarakat akan dibingungkan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya.

Miss komunikasi antara pemerintah dan LPTK disinyalir menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakharmonisan di antara keduanya, sehingga proses penelitian dan pembuatan kebijakan tidak seiring sejalan. Untuk itu, masing-masing pihak hendaknya mulai berupaya untuk membangun hubungan positif dan

produktif sehingga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan pendidikan berbasis riset yang ilmiah dan bertanggungjawab. Komunikasi tersebut dapat dimulai dengan membuat nota kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam perumusan, pembuatan, implementasi, dan analisis kebijakan yang dibuat dalam ranah pendidikan. Dalam prakteknya, hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, oleh karena itu diperlukan kepedulian, kesadaran yang tinggi, dan kerja keras dari pihak-pihak terkait.

PENUTUP

Seiring bergulirnya waktu, masalah-masalah pendidikan di Indonesia kian kompleks. Mulai dari masalah akses pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, pembiayaan pendidikan, sampai kurikulum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang efektif berbasis riset.

Selama ini, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan LPTK selaku pembuat penelitian tidak bersinergi dengan baik. Sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan tidak berdasarkan riset, dan riset yang dilakukan oleh LPTK tidak termanfaatkan dengan baik.

Untuk itu, pemerintah dan LPTK seyogianya membangun kerja sama yang baik dan produktif serta berkelanjutan demi lahirnya kebijakan-kebijakan pendidikan yang tepat guna dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, z. (2012). *Kebijakan Publik Berbasis Penelitian untuk Transformasi Sosial*. Diakses 4 November 2013 dari: <http://www.ireyogya.org/id/news/kebijakan-publik-berbasis-penelitian-untuk-transformasi-sosial.html>
- Bachtiar, Y. (In press). *Resistensi Bangunan Karakter Manusia Indonesia di Era Digital*. Jurnal Pendidikan Dasar.
- Bakry, A. (2010). *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010.
- Fattah, N. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Tilaar, H. A. R. & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. Solihin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Wahyudin, D, Dkk. (2009). *Landasan Pendidikan Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.